

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dengan segala aktivitas yang cukup padat secara tidak langsung membutuhkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk digunakan bagi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. “Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan (Jaelani, 2019)”.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Anggaran pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan dana yang berupa pajak daerah. Sumber pajak pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu terdiri dari pajak restoran, pajak bumi dan bangunan yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Sejak tahun 1999 penetapan pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang menjadi wewenang daerah akan menjadi salah

satu sumber kas keuangan daerah. Salah satu bentuk badan penerimaan negara yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor minyak dan gas adalah sector perpajakan. Pajak adalah penerimaan negara yang terbesar. Pendapatan pajak didapatkan dari pembayaran rakyat kepada negara yang kemudian memberikan kontribusi nyata dalam menunjang pengelolaan biaya pemerintahan dan pembelanjaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah pajak dan negara dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tersebut. Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peraturan tersebut setiap daerah jadi mempunyai peraturan-peraturan tersendiri agar bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Setiap daerah diwajibkan untuk berkembang agar dapat mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kemudian membuat

kebijakan otonom daerah dimana untuk mengatur wewenang daerah agar masyarakat tersebut dapat sejahterah. Sidoarjo juga diyakini memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor restoran, karena kabupaten sidoarjo yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk kumpul dan menghabiskan waktu di sebuah mall atau pertokoan serta banyaknya hotel.

Peningkatan jumlah restoran yang cukup banyak di daerah Sidoarjo tentu memberikan sisi positif dimana Sidoarjo ini padat dengan penduduknya yang cukup banyak menyukai tempat-tempat restoran untuk berkumpul atau menghabiskan waktu di restoran tersebut. Sementara itu pada perolehan realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 mencapai Rp 5 Milyar lebih atau sebanyak 5.232.439.930,929 dengan jumlah sebanyak 628 orang Wajib Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran. Pada perolehan tersebut hanya 8,66% dibandingkan realisasi seluruh Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar Rp 1 triliun atau sebanyak 1.016.000.000.000. Pajak restoran cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Sidoarjo setiap per tahun mempunyai target dimana dalam penerimaan pajak. Pajak restoran ini merupakan potensial sehingga dengan adanya potensial tersebut dapat meningkatkan realisasi atau pendapatan dalam penerimaan pajak restoran. Dengan kontribusi pajak restoran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu penerimaan pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan pendapatan kontribusi dalam pembangunan daerah Sidoarjo.. PBB ini

memiliki Wajib Pajak (WP) tertinggi dari pajak yang lainnya, oleh karena itu Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB ini merupakan salah satu properti pajak daerah dimana untuk memfasilitasi daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah Sidoarjo. Berikut hasil perolehan data dari Berikut tabel realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2016– 2020:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasai
2016	840,105,278,889	851,202,583,297
2017	967,469,744,787	1,009,885,429,350
2018	1,054,293,324,376	1,170,351,918,181
2019	1,550,000,000,000	1,185,000,000,000
2020	1,307,000,000,000	1,016,000,000,000

Sumber: (BPKPD Sidoarjo 2018) (Amaluddin, 2019) (Dinnata, 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa kasus dari tahun 2016 hingga 2020 realisasi anggaran pajak bumi dan bangunan tidak selalu stabil. Ada yang terealisasi dengan baik sehingga sesuai dengan target anggaran, adapun yang tidak terealisasi dengan baik, sehingga antara target dengan realisasi lebih kecil daripada target anggaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 dan 2020 pajak bumi dan bangunan tidak terealisasi sesuai target.

Fenomena penelitian ini yaitu banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Melihat kondisi perekonomian yang belum stabil dimasa pandemi sekarang dapat mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya yaitu omzet perusahaan menurun menyebabkan pendapatan tiap individu pajak berkurang, kesempatan kerja menurun, sehingga seseorang kebingungan mencari alternatif penghasilan. Walaupun kondisi saat ini

mungkin terjadi dalam waktu singkat, dapat mempengaruhi sikap seseorang dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya (Supriyati, 2020).

Setiap tahunnya pajak daerah Kabupaten Sidoarjo selalu mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasinya. Namun, dalam perubahan target pajak daerah setiap tahunnya tergantung dari kebijakan pemerintah serta perkembangan dari kabupaten Sidoarjo.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi pajak Restoran terhadap pendapatan pajak daerah dilihat dari rasio efektivitas?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi Bangunan terhadap pendapatan pajak daerah dilihat dari rasio efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mentahui kontribusi pajak Restoran terhadap penerimaan pajak daerah dilihat dari rasio efektivitas
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pajak daerah dilihat dari rasio efektivitas

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melihat dan mengevaluasi penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pembangunan pajak daerah sebagai bentuk kesejahteraan daerah tersebut.
2. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk membantu memahami lebih lanjut mengenai penerimaan pajak daerah dan factor yang mempengaruhinya. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjadi referensi serta tambahan ilmu untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar mengenai apa yang melatarbelakangi penelitian ini, dan apa saja yang menjadi rumusan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga dalam penelitian ini, menguraikan mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisa data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang data yang telah terkumpul dan pembahasan terkait analisis yang telah dilakukan baik analisis deskriptif maupun analisis statistik. Isi dari bab ini meliputi gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan dan evaluasi terkait keterbatasan pada penelitian serta saran atas keterbatasan tersebut